

POLICY BRIEF: 001/GT/VII/2015

NASKAH MASUKAN UNTUK KEBIJAKAN MENTERI PERTANIAN RI

**MEKANISME BARU STABILISASI PASOKAN  
DAN HARGA PANGAN POKOK**



GUGUS TUGAS KEDAULATAN PANGAN

JULI 2015

# **MEKANISME BARU STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK**

## **I. LATAR BELAKANG**

Mengawali bulan Juli 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) membuat suatu pengumuman yang menjadi rujukan awal untuk mengevaluasi pilihan kebijakan dan kerja keras kepemimpinan dan jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Produksi Padi tahun 2015 diperkirakan naik sebesar 6,64 Persen dibandingkan tahun 2014. Tahun 2015 sebesar 75,55 juta Ton GKG (Gabah Kering Giling) sedangkan tahun 2014 sebesar 70,85 Juta Ton GKG, Luas panen 2015 diperkirakan naik 512,06 ribu hektar (3,71%). Produktivitas 2015 diperkirakan naik 1, 145 kuintal / hektar (2,82%). Produksi Jagung diperkirakan naik sebesar 8,72 % dibandingkan Tahun 2014. Tahun 2015 sebesar 20,67 Juta Ton dan tahun 2014 sebesar 19,01 Juta Ton. Luas panen 2015 diperkirakan naik 160,48 ribu hektar (4,18%) dan Produktivitas 2015 diperkirakan naik 2,16 kuintal/hektar (4,36%). Produksi Kedelai diperkirakan naik sebesar 4,59 % dibandingkan tahun 2014. Tahun 2015 sebesar 998,87 ribu Ton dan tahun 2014 sebesar 955,00 ribu ton. Luas panen 2015 diperkirakan naik 24,67 ribu hektar (4,01%) dan produktivitas 2015 diperkirakan naik 0,09 kuintal / hektar (0,58%).

Kepala BPS Dr. Suryamin, M.Sc menyampaikan bahwa “Untuk pertama kali dalam 10 tahun terakhir 3 komoditi (padi, jagung, kedelai) ini mengalami kenaikan secara bersamaan hal ini dikarenakan program UPSUS (Upaya Khusus) yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian”. Capaian Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai 2015 itu telah membangkitkan optimisme Presiden bahwa kerja Kementrian Pertanian sudah berada dalam jalur yang tepat. Dengan tetap menyadari akan adanya kemungkinan pengurangan angka capaian itu disebabkan oleh El Nino, pengumuman itu telah membuat Menteri Pertanian Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementerian Pertanian semakin percaya diri, menjadi lebih bersemangat, dan giat bekerja dalam menempuh jalan untuk mencapai target-target swasembada pangan.

Impor pangan telah menunjukkan komplikasi ekonomi rente dalam perdagangan impor pangan, dan kecanduan yang parah. Pilihan kebijakan pertanian untuk mengatasi kesenjangan

antara ketersediaan/stok dan kebutuhan konsumsi dilakukan bukan dengan cara pengadaan komoditas pangan melalui impor melalui perdagangan internasional, melainkan dengan cara menggenjot produktivitas dan frekuensi penanaman, dengan perbaikan prasarana dan sarana pertanian, distribusi pupuk, racun hama dan asintan (alat mesin pertanian). Angka produksi padi, jagung dan kedelai itu diyakini telah membuktikan keampuhan formula itu. Meski keampuhan jalan ini terbukti, namun keberhasilan pemerintah juga akan ditentukan oleh ampuh tidak nya cara yang dipergunakan untuk mengatasi ketidakpuasan dan permainan dari pemain-pemain impor pangan yang telah menikmati kekayaan dari privilege mereka selama ini.

Mencapai swasembada bisa saja dengan memaksa petani menjadi produktif dan meningkatkan frekuensi penanaman, dengan perbaikan prasarana dan sarana pertanian, dan distribusi pupuk, racun hama dan asintan. Pengumuman BPS mengenai nilai tukar petani di bulan Juni 2015 menunjukkan bahwa kesejahteraan petani belum meningkat signifikan seiring dengan meningkatnya produksi pangan. Angka Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Juni 2015 sebesar 100,52 atau naik 0,50 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP sedikit ini, menurut BPS, dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,15 persen lebih besar dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,65 persen.

Swasembada pangan tanpa meningkatkan kesejahteraan petani dapat membuat pemerintah digugat legitimasinya bahwa peningkatan anggaran dan belanja Kementerian Pertanian bukanlah untuk kesejahteraan petani, melainkan untuk mereka yang mengerjakan dan membuat kebijakan dan menjalankan program –program pertanian. Petani pun hanya diperlakukan sebagai objek kebijakan belaka.

Bagaimana cara pencapaian swasembada pangan yang sekaligus menyejahterakan petani? Tak mungkin terjadi kecuali dengan menempatkan petani itu sendiri sebagai subjek yang sejahtera dan berdaulat. Perbandingan antara Sensus Pertanian (SP) 2013 dengan SP 2003 menunjukkan bahwa pengurangan jumlah rumah tangga petani berlangsung secara drastis, yakni kurang lebih 1 rumah tangga petani per 1 menit. Mereka terpaksa meninggalkan "profesi"nya sebagai petani. Ini adalah krisis agraria dari pertanian rakyat, yang utamanya karena empat hal utama, yakni konversi tanah pertanian rakyat, usaha pertanian rakyat tidak menguntungkan, hilangnya minat pemuda-pemudi untuk bekerja sebagai petani di pertanian

rakyat, dan perampasan-perampasan tanah pertanian rakyat untuk proyek-proyek perkebunan, industri, pertambangan, infrastruktur, dsb.

Kementerian Pertanian telah berhasil dipimpin dengan menjalankan Upaya Khusus (UPSUS) untuk peningkatan swasembada pangan, namun belum sampai bisa menyelesaikan krisis agraria dari pertanian rakyat itu. Bagaimana caranya UPSUS itu diarsir sedemikian rupa dengan tambahan tujuan baru, yakni membuat pertanian rakyat bisa meningkatkan pendapatan petani produsen bahan pangan pokok?

Model operasi pasar belum optimal untuk menjaga stabilisasi harga secara permanen, dan orientasinya pada keterjangkauan harga jual dan ketersediaan komoditas pangan. Sementara itu distribusi beras untuk orang miskin (raskin) berfungsi sebagai jaring pengaman saja. Perlu suatu cara baru yang langsung dapat berpengaruh pada dua variabel pokok yang yakni untuk meningkatkan pendapatan petani itu. Solusi permanen dari pemerintah yang baru untuk menyediakan bahan-bahan pokok yang terjangkau dan pasokan yang terus-menerus sangat diperlukan dalam rangka mengatasi masalah perbedaan yang sangat mencolok antara harga jual bahan pokok yang dihasilkan petani dengan harga beli konsumen. Dengan kata lain, diperlukan suatu mekanisme baru yang mampu membuat harga beli komoditas pertanian dari petani bisa dinaikkan, dan harga jual ke konsumen bisa terjangkau.

## **II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN**

Tujuan umum dari inisiatif ini adalah menurunnya jumlah rumah tangga petani yang meninggalkan pertanian rakyat. Ruang intervensi yang hendak diurus adalah sirkuit produksi-sirkulasi-konsumsi pangan pokok, dengan berbagai upaya untuk memastikan hal-hal berikut dapat dicapai, yakni:

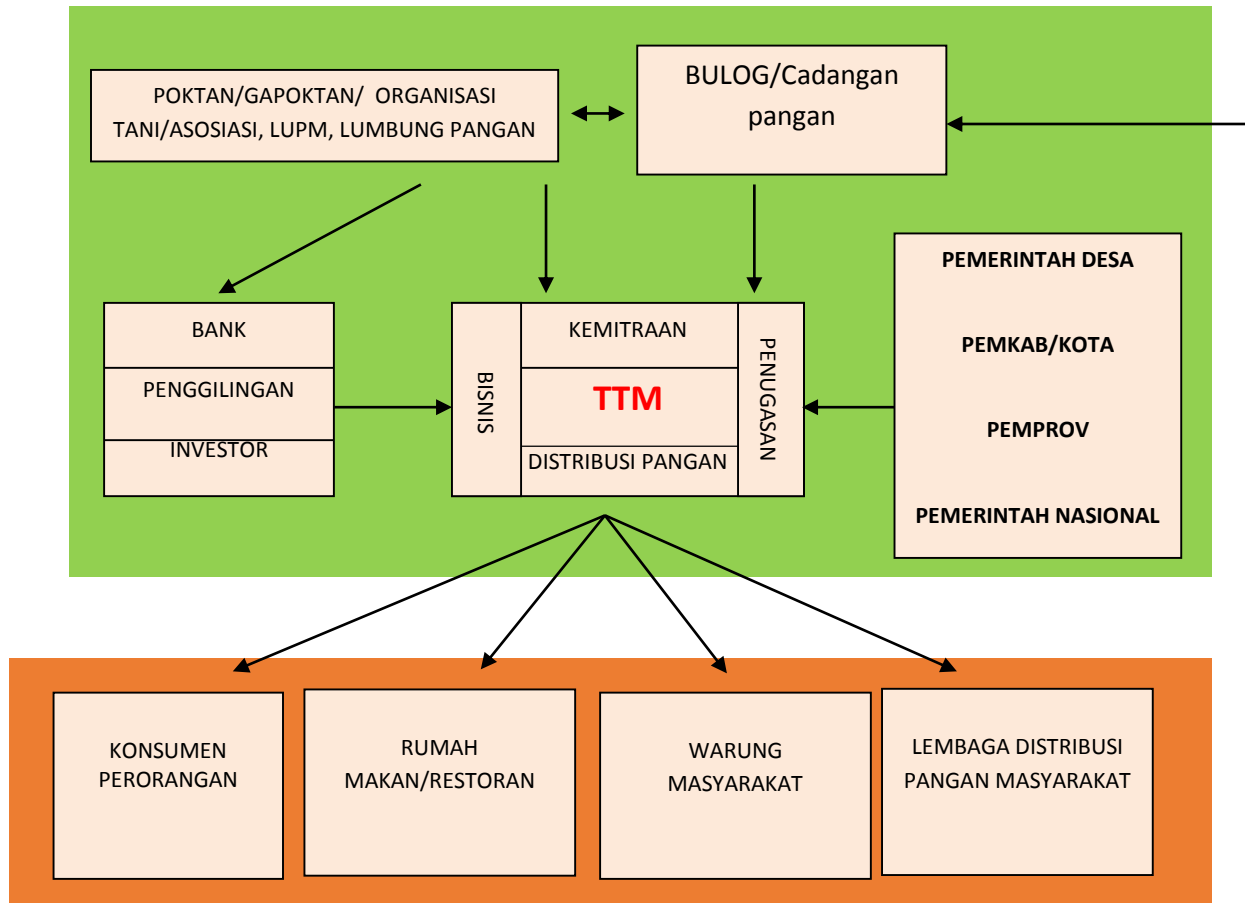
1. Penyerapan komoditas pangan pokok yang dihasilkan di dalam negeri dengan menjamin keuntungan yang lebih baik bagi petani produsen.
2. Stabilisasi pasokan dan harga untuk menjamin keberlanjutan akses masyarakat terhadap komoditas pangan pokok dengan harga yang terjangkau.
3. Pembaruan nexus produksi – sirkulasi – konsumsi bahan pokok yang ditandai dengan terbentuknya jaringan perusahaan swasta mitra BULOG yang membeli pangan pokok dari petani dan menjual ke pemasok komoditas pangan pokok ke Toko-toko Tani Murah.

## **III. INDIKATOR KEBERHASILAN**

Beberapa indikator keberhasilan dari implementasi mekanisme baru untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan rakyat ini meliputi:

1. Terserapnya produksi pangan pokok dari petani.
2. Beroperasinya unit distribusi pangan pokok yang dinamakan Toko Tani Murah yang mampu melayani kebutuhan bahan pokok dari keluarga-keluarga konsumen
3. Diperbaharunya sirkuit produksi-sirkulasi-distribusi pangan pokok.

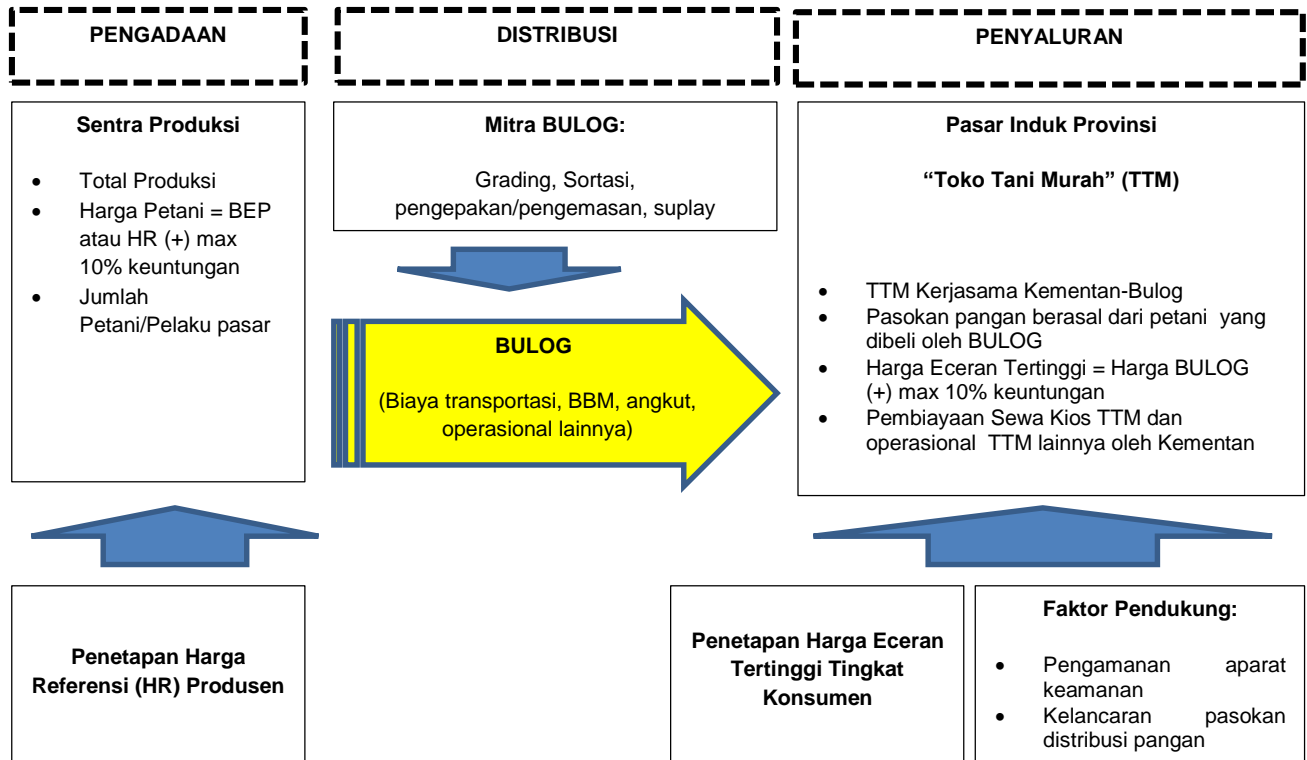
#### IV. KERANGKA KERJA



#### Keterangan:

1. Toko Tani Murah (TTM) melakukan kontrak kerja dengan petani, Gapoktan, asosiasi, Lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) untuk pengadaan pangan pokok sesuai kebutuhan simpel pangan komunitas (SPK) sebagai entitas bisnis dalam kondisi normal.
2. TTM mendapat penugasan pemerintah (Bulog) untuk mendistribusikan pangan pada kondisi-kondisi harga-harga bahan pokok normal maupun bergejolak
3. TTM melakukan bisnis dengan bank, penggilingan padi atau investor lain untuk memperkuat posisi mereka dalam mengelola pangan.

Secara fungsional mekanisme pengadaan, distribusi, dan penyaluran bahan pangan dapat dilihat dalam gambar berikut:



## V. ORGANISASI PELAKSANA

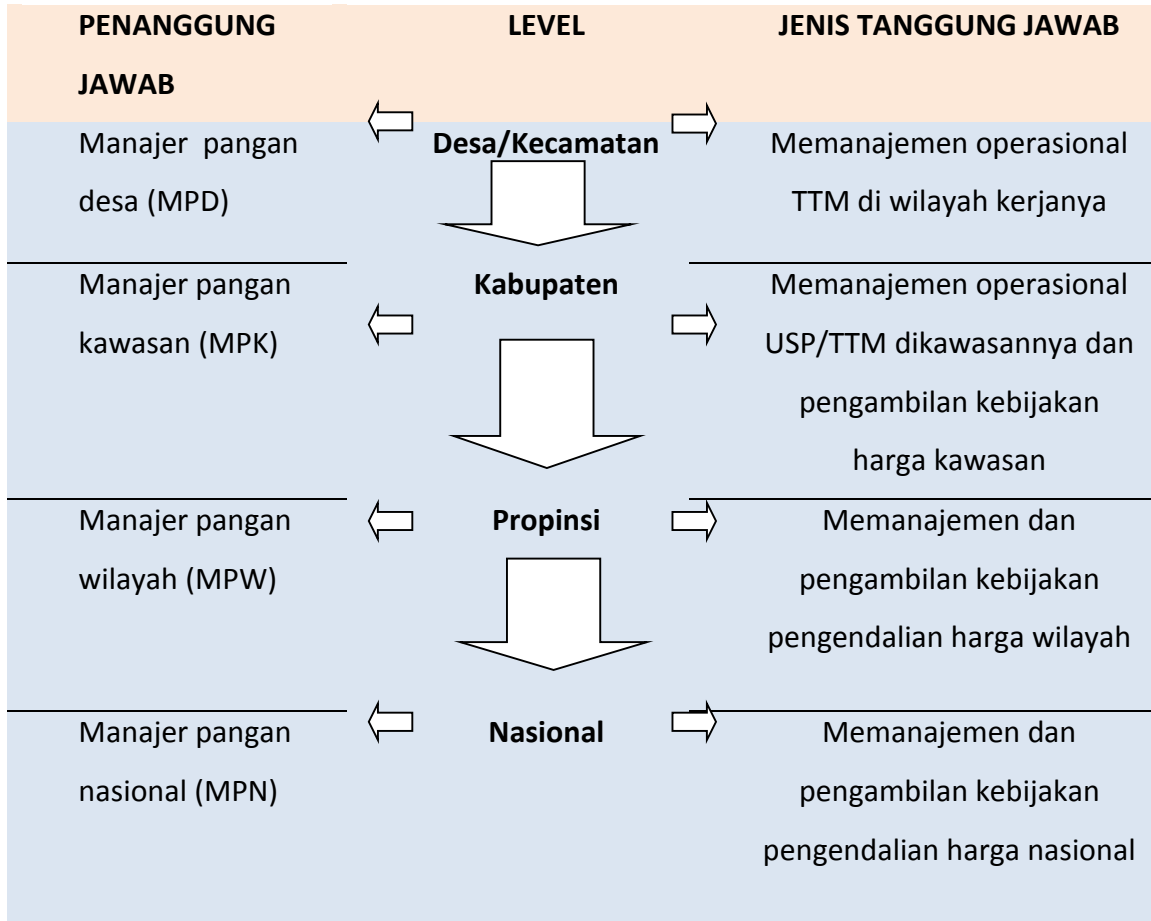
Organisasi pelaksana USP/TTM terdiri dari tiga komponen utama yakni pemerintah sebagai pemilik wewenang, tim pelaksana dan tim pendamping. Organisasi sendiri berjenjang dari nasional hingga level desa. Secara rinci organisasi pelaksanaan USP/TTM dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Organisasi Pelaksana USP/TTM**

<b>Jabatan</b>	<b>Blok wewenang/kebijakan</b>	<b>Blok pelaksana</b>	
Penanggung Jawab	Kepala BULOG Menteri Pertanian Menteri Perdagangan		
TIM Koordinasi Nasional	Direktur Komersial BULOG Badan Ketahanan Pangan Direktorat Perdagangan Dalam Negeri	Manajer pangan nasional (MPN)	
TIM Koordinasi Provinsi	Kepala Divisi Regional BULOG Badan Ketahanan Pangan Provinsi Dinas Perdagangan Provinsi	Manajer pangan wilayah (MPW)	
TIM Koordinasi Kabupaten	Kepala Sub-Divisi Regional BULOG Badan Ketahanan Pangan kabupaten Dinas Perdagangan Kabupaten	Manajer pangan kawasan (MPK)	
Tim Koordinasi Kecamatan		Manajer Pangan Kecamatan	
Tim Koordinasi Desa		Manajer pangan desa (MPD)	

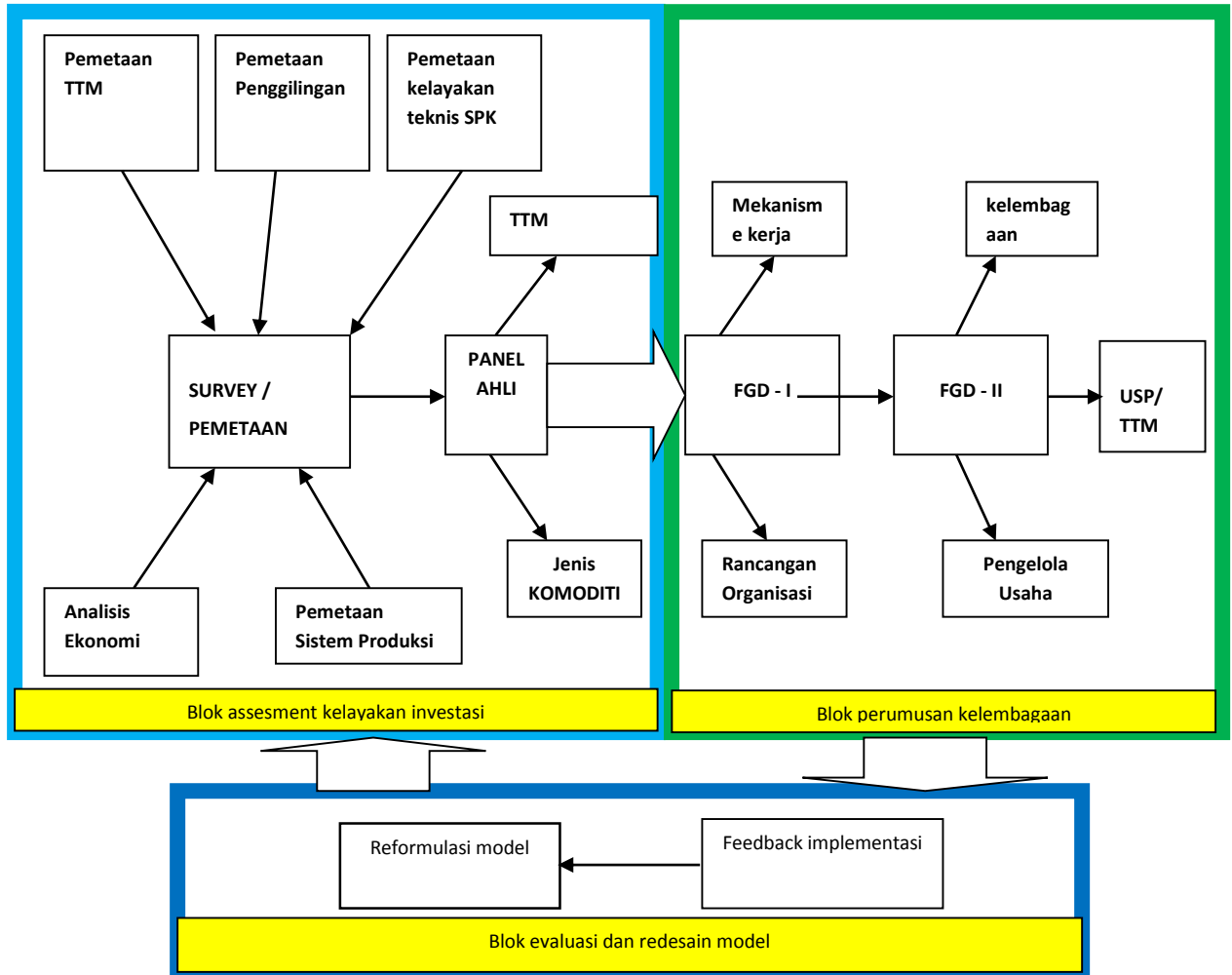


Sementara itu, tanggung jawab untuk pelaksana lembaga stabilisasi pangan dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2. Jenjang Organisasi dan Level Tanggung Jawab

## VI. KERANGKA IMPLEMENTASI



## VII. PENUTUP

Inflasi dan ancaman kekurangan pangan selalu menjadi momok pemerintah karena sangat merugikan perekonomian negara. Usaha membangun cadangan pangan dan pengendalian inflasi terlalu fokus pada wilayah makro dan tentatif sehingga kurang melibatkan masyarakat akar rumput. Mekanisme Baru Stabilisasi Pangan (USP) ini dirancang sebagai instrumen pemupukan cadangan pangan dan pengendalian inflasi yang melibatkan jaringan transaksi ekonomi dari level desa hingga level nasional.